

Kepentingan Tiongkok Untuk Tetap Mempertahankan Hubungan Diplomatik Dengan Afghanistan-Taliban

Gede Bayu Dharma Putra ¹⁾, A.A. Bagus Surya Widya Nugraha ²⁾, Adi Putra Suwecawangsa³⁾

^{1,2,3)} Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kepentingan Tiongkok dalam mempertahankan hubungan dengan Afghan-Taliban pada tahun 2021 melalui analisis sistemik. Sejak 1955, Afghanistan dianggap sebagai negara periferi mulai menarik perhatian Tiongkok ketika invasi AS di Afghanistan pada tahun 2001. Konflik Taliban-AS membuat Tiongkok menjauhi Taliban dan mendekatkan diri kepada Afghanistan demi preferensi ekonomi mereka. Pada 2021, meski Taliban kembali berkuasa dan mendapat isolasi internasional, Tiongkok tetap melanjutkan hubungan bilateralnya dengan Afghan-Taliban. Dengan perspektif Realisme Defensif dan metode kualitatif digunakan untuk mengetahui kepentingan Tiongkok di Afghanistan. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa dinamika sistemik memengaruhi kebijakan Tiongkok dan dinamika Afghanistan-Taliban yang pada akhirnya mendorong Tiongkok untuk mempertahankan hubungan tersebut. Konsep Geo-ekonomi memperkuat argumentasi terutama terkait proyek OBOR dan pergeseran kapabilitas dari militer ke ekonomi di Asia Tengah.

Kata-kunci : Afghanistan, Kepentingan, Mempertahankan hubungan, Realisme Defensif, Sistemik, Taliban, Tiongkok

Abstract

This study examines China's interest in maintaining relations with the Afghan-Taliban in 2021 through a systemic analysis. Since 1955, Afghanistan was regarded as a peripheral state but began attracting China's attention following the US invasion of Afghanistan in 2001. The Taliban-US conflict led China to distance itself from the Taliban while aligning more closely with Afghanistan to pursue its economic preferences. In 2021, despite the Taliban's return to power and international isolation, China continued its bilateral relationship with the Afghan-Taliban. Using Defensive Realism and a qualitative method to explore China's interests in Afghanistan, the study finds that systemic dynamics influence China's policy as well as the dynamics between Afghanistan and the Taliban, prompting China to sustain these relations. The concept of geo-economics strengthens the argument, particularly regarding the OBOR project and the shift from military to economic capabilities in Central Asia.

Keywords : Afghanistan, China, Interest, Maintaining Relations, Defensive Realism, Systemic, Taliban,

Kontak Penulis

Gede Bayu Dharma Putra
Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana
Bali, Indonesia
Telp: +6281237700304 Fax: +62 361 255916
E-mail : gedebayudharmaputra@gmail.com

PENDAHULUAN

Hubungan Tiongkok dengan negara regional memainkan peran penting dalam kebijakan luar negerinya. Tiongkok berbatasan langsung dengan 14 negara, membentang sepanjang 22.800 km, dengan beberapa titik rawan konflik. Salah satunya adalah Koridor Wakhan, Perbatasan Tiongkok-Afghan, memberikan Afghanistan posisi dalam kebijakan luar negeri Tiongkok (Dunning, 2021)

Sejarah hubungan bilateral Tiongkok-Afghanistan terbagi menjadi empat fase. Fase pertama dimulai pada Januari 1955, ketika Afghanistan menjadi salah satu dari sedikit negara yang mengakui Tiongkok Komunis. Akan tetapi, Tiongkok lebih memprioritaskan hubungannya dengan Pakistan, menganggap Afghanistan sebagai negara periferi (Huasheng, 2012). Hubungan bilateral melemah ketika Afghanistan berada dibawah pengaruh Soviet pada tahun 1980-an, namun Tiongkok tetap menjaga hubungan ramah dengan Afghanistan dengan sikap 'rendah hati'. Tiongkok tidak ikut campur dalam segala urusan Afghanistan saat itu.

Fase kedua dimulai setelah berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1991 hingga 2001. Melemahnya pengaruh Soviet memunculkan gerakan ekstremis Islam yang mengambil alih pemerintahan Afghanistan, terutama dengan berdirinya *Islamic State of Afghanistan* pada tahun 1996 (Tahiri, 2017). Peristiwa tragis 11 September 2001 (9/11), di mana kelompok Al-Qaeda melakukan serangan teroris di Amerika Serikat, memicu respons Amerika Serikat dalam bentuk kebijakan "*Global War on Terror*" (GWOT). Amerika Serikat kemudian melakukan invasi ke Afghanistan untuk menghadapi kelompok Al-Qaeda yang diperkirakan berada di sana di bawah pemerintahan Taliban. Pada fase ini, Tiongkok cenderung menghindari isu-isu di Afghanistan kecuali yang berkaitan dengan keamanan nasionalnya sendiri. Tiongkok khawatir terhadap potensi ancaman

dari gerakan Islam ekstremis, termasuk Taliban, terhadap wilayah Xinjiang yang rentan terhadap pengaruh tersebut. Namun, Tiongkok tidak ingin terlibat dalam konflik yang bertentangan dengan kebijakan Amerika Serikat, dan juga tidak ingin melihat pengaruh Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah terlalu kuat (Ludwig, 2015).

Fase ketiga dimulai ketika Taliban kehilangan kekuasaan di Afghanistan. Tiongkok memulai langkah proaktifnya dengan mengirim delegasi untuk menyambut kembalinya pemerintahan Afghanistan yang baru dan memulai berbagai inisiatif ekonomi guna menstabilkan situasi pasca-perang. Tiongkok juga meningkatkan bantuan dan kerjasama dengan Afghanistan serta berperan dalam perundingan perdamaian antara Taliban dan pemerintahan Afghanistan.

Perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Taliban pada tahun 2020 membawa pengaruh signifikan terhadap dinamika di Afghanistan (Suwari, 2021). Dengan penarikan pasukan Amerika Serikat, Taliban kembali menguasai Afghanistan, menandai fase baru dalam hubungan dengan Tiongkok. Tiongkok, meskipun menyadari risiko dan ketidakpastian yang terkait dengan rezim Taliban, tetap mempertahankan hubungan diplomatik dengan Afghanistan dan bahkan membuka kembali kedutaan besar di bawah pemerintahan Taliban. Ini menunjukkan perubahan dalam pendekatan Tiongkok terhadap Afghanistan dan perhatiannya terhadap dinamika politik regional.

Untuk membantu peneliti memahami fenomena ini, dua literatur dijadikan pedoman. Literatur pertama yang digunakan oleh peneliti adalah tulisan yang berjudul "*China and Afghanistan: Tiongkok's Interests, Stances, and Perspective*" oleh Zhao Huaseng (2012) membahas kebijakan luar negeri Tiongkok, sikap, dan kepentingan nasional terhadap Afghanistan dengan menggunakan kerangka

kerjasama multilateral-regional SCO. Fokus utamanya adalah pada dampak Afghanistan terhadap penetapan kebijakan dan agenda di SCO, karena Afghanistan berbatasan dengan enam anggota negara tetangga SCO. Serangan teroris 9/11 oleh Al-Qaeda yang berbasis di Afghanistan menghasilkan reaksi dari SCO, yang menyatakan keprihatinan mendalam dan kekhawatiran atas ketidakstabilan di Afghanistan. Penetapan SCO-Afghanistan Contact Group pada tahun 2004 menandai langkah penting dalam hubungan langsung antara SCO dan Afghanistan, dengan fokus pada pembangunan sosial-ekonomi dan menghindari intervensi militer. SCO membantu proses pembangunan nasional Afghanistan melalui agenda Kabul Process yang dimulai pada tahun 2014, meskipun agenda ini dihadapi dengan tantangan, termasuk kembalinya Taliban ke kekuasaan di Afghanistan.

Literatur kedua adalah tulisan oleh Jonathan Z. Ludwig yang berjudul *"Sino-Afghan Relations in the Twenty-First Century: From Uncertainty to Engagement?"* memberikan perhatian pada pola interaksi antara Tiongkok dan Afghanistan, khususnya sebelum dan sesudah peristiwa 9/11. Sebelumnya, hubungan Tiongkok-Afghanistan minim, dengan Tiongkok lebih memprioritaskan hubungan dengan Pakistan dan terdampak oleh konflik dengan India dan Uni Soviet. Setelah 9/11, Tiongkok mengadopsi kebijakan yang hati-hati dan pragmatis terhadap Afghanistan, dengan memperhatikan kestabilan di wilayah Xinjiang, pengembangan ekonomi, dan pengaruh Amerika Serikat di Asia Tengah. Pembentukan SCO menjadi bagian penting dari strategi Tiongkok untuk mencapai kepentingan nasionalnya, termasuk berkontribusi pada pembangunan Afghanistan.

Meskipun kedua literatur tersebut memberikan wawasan yang berharga tentang hubungan Tiongkok-Afghanistan, mereka belum sepenuhnya menjelaskan fenomena interaksi Tiongkok-Afghanistan-Taliban.

Demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis pola interaksi Tiongkok dengan Afghanistan (termasuk Taliban) pada tahun 2021, terutama dalam konteks sistem internasional. Hal ini penting untuk memahami dampak sistem internasional terhadap dinamika hubungan regional, serta tanggapan Tiongkok terhadap dinamika tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori Realisme Defensif dan konsep Geo-Ekonomi untuk menganalisa Tiongkok mempertahankan hubungan diplomatiknya dengan Taliban. Realisme Defensif, sebagaimana dijelaskan oleh Kenneth N. Waltz (1979), berfokus pada analisis level sistem dalam konteks anarki internasional, di mana negara harus mengandalkan diri sendiri untuk menjaga eksistensinya. Menurut Waltz, keamanan menjadi tujuan utama dalam sistem internasional yang anarkis, yang pada gilirannya memunculkan dilema keamanan. Dilema ini muncul karena upaya suatu negara untuk meningkatkan keamanannya justru dapat mengurangi keamanan negara lain. Waltz juga menyebutkan bahwa kekuatan yang berlebihan bisa memicu lawan dan menghasilkan efek destruktif. Dalam pandangan Waltz, negara yang dapat mengatur sistem memiliki keuntungan dibandingkan negara lain.

Mendukung pandangan ini, Fareed Zakaria (1998) berargumen bahwa negara akan memaksimalkan peluang untuk mencapai kepentingan nasional mereka, sementara Telbani (2002) menyatakan bahwa besarnya peluang ini sebanding dengan kekuatan negara. Oleh karena itu, kekuatan dianggap sebagai instrumen untuk mencapai keamanan, bukan tujuan utama.

Realisme Defensif juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan kekuatan melalui strategi yang moderat, defensif, dan menghindari agresi. Jervis (1978) menambahkan bahwa dilema keamanan dapat dikurangi melalui kerjasama dan menjaga keseimbangan

kekuatan. Secara keseluruhan, dalam Realisme Defensif, negara berfokus pada keamanan sebagai tujuan utama, dengan menghindari akumulasi kekuatan yang berlebihan sambil mempertahankan posisi stabil dalam sistem internasional.

Konsep geo-ekonomi juga digunakan untuk melengkapi pemahaman kekuatan sebagai instrumen untuk mencapai keamanan. Geo-ekonomi merupakan penggunaan instrumen ekonomi untuk memajukan kepentingan nasional dan mencapai keuntungan geopolitik (Blackwill & Harris, 2016). Hsiung (2009) kemudian memperkenalkan geo-ekonomi sebagai pendekatan yang menggantikan kekuatan yang berfokus pada militer dengan fokus ekonomi dalam memenuhi keamanan negara. Alymenko & Harrison (2017) menyebutkan geo-ekonomi menekankan pada pentingnya kekuatan ekonomi seperti sumber daya manusia, teknologi dan efisiensi produk dalam menentukan besar kekuatan negara. Scholvin & Wigel (2018) menambahkan bahwasanya geo-ekonomi dapat berpadu dengan Realisme Defensif melalui dimensi geografi, menggunakan kekuatan ekonomi sebagai alat untuk mengontrol wilayah spesifik tanpa mengubah teritorial negara.

Demikian menggunakan geo-ekonomi untuk menganalisis kepentingan nasional Tiongkok dalam hubungannya dengan Afghanistan. Dipadukan dengan pendekatan Realisme Defensif, yang berfokus pada strategi defensif non-militer, geo-ekonomi menjelaskan bagaimana Tiongkok memanfaatkan kekuatan ekonomi untuk mempertahankan hubungannya dengan Afghanistan dan mencapai tujuannya tanpa konflik militer.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui media daring, jurnal ataupun sumber lainnya yang relevan. Unit analisis utamanya

adalah sistem internasional, di mana kondisi anarki dan perubahan struktur di Asia Tengah mempengaruhi kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap Afghanistan, dianalisis menggunakan teori Realisme Defensif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis mengikuti tahapan Creswell (2009), yaitu penyusunan data, analisis dengan teknik koding untuk mengidentifikasi tema, dan interpretasi menggunakan teori Realisme Defensif. Hasil penelitian disajikan secara kronologis untuk memudahkan pemahaman mengenai dinamika hubungan Tiongkok dan Afghanistan, hingga keputusan Tiongkok mempertahankan hubungan diplomatik di bawah rezim Taliban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tiongkok dan Upaya Mempertahankan Hubungan dengan Afghanistan-Taliban

Dalam sejarah kebijakan luar negerinya, Tiongkok cenderung pasif dan berkomitmen pada prinsip non-intervensi, yang telah ada sejak era Negara Berperang dan tertanam kuat dalam masyarakat Tiongkok. Michael Pillbury (2015) menjelaskan bahwa strategi Tiongkok menekankan prinsip non-intervensi dan tidak mencampuri urusan internal negara lain kecuali terkait langsung dengan kedaulatan Tiongkok. Sikap netral ini dinilai menguntungkan dalam diplomasi untuk menghindari konflik yang tidak perlu. Pendekatan ini digunakan Tiongkok dalam menjalin hubungan diplomatik dengan Afghanistan, terutama setelah Taliban berkuasa pada 2021. Meski sebelumnya dianggap sebagai negara pinggiran, Afghanistan menjadi perhatian karena lokasinya yang strategis dan potensi ancaman di Xinjiang. Hubungan ini mencerminkan kepentingan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional dan melindungi proyek strategisnya di Asia Tengah, terutama di Afghanistan.

Dinamika Hubungan Tiongkok-Afghanistan Pra Tragedi 9/11

Sejak tahun 1955, Tiongkok tidak terlalu memperhatikan Afghanistan, hanya menganggapnya sebagai negara periferi (Huaseng, 2012; Ludwig, 2015). Hubungan bilateral semakin memburuk setelah Taliban berkuasa pada 2001 di bawah kepemimpinan Mullah Mohammad Omar. Di bawah rezimnya, Afghanistan dilanda korupsi, ketidakstabilan, dan pelanggaran HAM, terutama terhadap perempuan. Pengangkatan pejabat yang tidak memenuhi kualifikasi memperburuk kekacauan administratif.

Tiongkok sangat memprioritaskan keamanan nasional dan menentang terorisme, ekstremisme, serta separatisme (Three Evils), terutama terkait dengan kelompok ETIM di Xinjiang. Kekhawatiran meningkat ketika kelompok Uighur yang tergabung dalam ETIM menjalin kontak dengan Taliban setelah terbentuknya Islamic Emirate of Afghanistan (Ludwig, 2015). ETIM, yang beroperasi dari Afghanistan, melakukan serangan ke Tiongkok pada akhir 1990-an, menewaskan 140 orang (Pantucci & Schwarck, 2014). Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bagi Tiongkok, karena jika Afghanistan gagal mengendalikan terorisme, negara tersebut bisa menjadi pusat inkubasi teroris yang berpotensi mengancam stabilitas regional, terutama di Asia Tengah dan Xinjiang. Ketidakstabilan di Afghanistan juga dapat berdampak negatif pada kerja sama geo-ekonomi dan investasi infrastruktur Tiongkok di kawasan tersebut.

Dinamika Hubungan Tiongkok-Afghanistan Pasca Tragedi 9/11

Pada 11 September 2001, sekelompok teroris membajak empat pesawat dan menyerang gedung World Trade Center (WTC), menewaskan 2996 orang yang kemudian dikenal sebagai 9/11 (History, 2010). Kelompok teroris Al-Qaeda bertanggung jawab atas penyerangan tersebut. Merespons tragedi tersebut, AS dibawah Presiden George W. Bush meluncurkan kebijakan *Global War on Terror*

(GWOT) yang segera mendapatkan dukungan dari NATO, Inggris dan Pakistan (Wildman & Bennis, 2010). Al-Qaeda yang diketahui bersembunyi di Afghanistan dibawah pemerintahan Taliban membuat AS meminta Taliban untuk menyerahkan pimpinan Al-Qaeda, Osama Bin Laden, namun permintaan tersebut ditolak. Hal tersebut memicu serangkaian serangan udara yang mengawali invasi AS di Afghanistan sehingga Taliban kehilangan kontrol atas Kabul pada November 2001 (Wildman & Bennis, 2010).

Memanfaatkan momentum GWOT, Tiongkok menyatakan kelompok teroris Uighur mengancam keamanan di Xinjiang. Pada tahun 2001, Tiongkok merilis dokumen kepada PBB yang mengklaim bahwa *"Terrorist Activities Perpetrated by Eastern Turkistan Organizations and their Ties with Osama bin Laden and the Taliban"* menduga bahwa *East Turkistan Force* terdiri lebih dari 40 organisasi di Tiongkok, Uzbekistan, Chechnya dan Afghanistan (Pantucci & Schwarck, 2014). ETIM disebut sebagai bagian 'major' dari jaringan Al-Qaeda dan diduga menerima bantuan finansial sebesar US\$ 300.000 dari Osama Bin Laden. Kepentingan Tiongkok kemudian membuahkan hasil ketika AS menyatakan dukungan dengan menyatakan ETIM sebagai kelompok teroris yang mempunyai koneksi dengan Al-Qaeda.

Perang AS-NATO melawan Taliban dan terbentuknya pemerintahan Afghanistan di bawah Hamid Karzai, Tiongkok melihat peluang ekonomi di Afghanistan dan tetap berkomitmen pada prinsip non-intervensi dalam perang Afghanistan-AS. Meskipun tidak terlibat secara militer, Tiongkok tetap memanfaatkan perlindungan dari AS sambil menjaga netralitasnya. Tiongkok juga khawatir dengan pengaruh AS yang terlalu lama di Asia Tengah, tetapi tidak ingin menjadi oposisi dengan kebijakan yang bertentangan.

Selain sektor ekonomi, ancaman militan Uighur juga menjadi fokus Tiongkok. Kesamaan

ideologi Taliban, ETIM, dan militan Uighur memperkuat ancaman tersebut diperkuat dengan koneksi antar kelompok yang terbentuk sejak tahun 1990-an (Wines & Declan, 2012).

Tiongkok meyakini bahwa Taliban tidak hanya sebuah kelompok ekstrimis, melainkan sebagai kekuatan politik yang signifikan (Huasheng, 2012). Menyadari bahwa Taliban tidak bisa dibumihanguskan begitu saja dengan kekuatan militer, melihat kapabilitas politik yang mereka punya. Zaef (2011) mengungkapkan bahwa Taliban menolak mendukung ETIM beroperasi di Tiongkok dan meminta ETIM untuk tidak bertindak agresif terhadapnya, meskipun tetap memberikan suaka terhadap ETIM. Demikian membuat Tiongkok cenderung untuk menghindari kemungkinan untuk memprovokasi Taliban yang berkaitan dengan ETIM.

Pada upaya rekonstruksi Afghanistan, Tiongkok mendukung penuh dan menawarkan bantuan ekonomi serta rekonstruksi senilai 150 juta USD pasca-perang (Huasheng, 2012). Fokus Tiongkok berada pada kerjasama bilateral pada bidang ekonomi dan politik dengan disahkannya *Treaty of Good Neighborly Friendship and Cooperation* pada tahun 2006, menegaskan hubungan bilateralnya pada ekonomi dan keamanan. Tiongkok juga terlibat pada level internasional dengan mengikuti inisiatif perdamaian PBB di London, Paris, Istanbul dan Afghanistan (Imran, 2019).

Selain kerjasama ekonomi, berbagai investasi juga dilakukan oleh Tiongkok pada rentang tahun 2002-2010. Tiongkok menginvestasikan sekitar 205.2 juta USD pada infrastruktur Afghanistan seperti telekomunikasi ZTE dan Huawei, pelatihan SDM serta infrastruktur lainnya (Huasheng, 2012; Ludwig, 2015). Lebih lanjut, Tiongkok juga memenangkan kontrak senilai 3,5 miliar USD atas hak eksklusif tambang tembaga Mes Aynak. Akan tetapi, terkendala pada sektor keamanan Afghanistan yang rapuh.

Tiongkok mengakui pentingnya stabilitas Afghanistan demi keamanan regional dan kepentingan ekonomi. Meski skeptis terhadap intervensi asing di Afghanistan, Tiongkok tetap mendukung pemerintahan sementara di Kabul yang didukung AS. Namun, Tiongkok kemudian memperingatkan bahwa campur tangan eksternal dapat mengancam keamanan regional. Tiongkok berperan dalam inisiatif perdamaian, termasuk mendukung Afghanistan menjadi anggota pengamat SCO pada 2012 (Zhang, 2010).

Presiden Xi Jinping memperkenalkan kebijakan "*neighborhood diplomacy*" pada 2013 untuk memastikan stabilitas regional demi kepentingan Tiongkok. Selain itu, Tiongkok menginisiasi proyek OBOR (*One Belt One Road*) yang melibatkan kerja sama multilateral di Asia, Afrika, dan Eropa. OBOR dipandang sebagai instrumen untuk mewujudkan "*China Dream*" dalam meningkatkan pengaruh global secara damai (Jyalita, 2021). Tiongkok juga memperkuat hubungan dengan Afghanistan melalui kerja sama ekonomi, termasuk proyek infrastruktur dan bantuan pembangunan.

Dalam upaya perdamaian, Tiongkok terlibat dalam dialog antara Taliban dan pemerintah Afghanistan serta mendukung perundingan damai internasional. Tiongkok juga mendukung resolusi UNSC yang memperpanjang mandat UNAMA pada 2019 untuk membantu stabilitas Afghanistan (UN Press, 2019). Dalam perjanjian damai Doha 2020, AS dan Taliban sepakat untuk menarik pasukan AS dan menghentikan operasi terorisme di Afghanistan.

Namun, setelah penarikan pasukan AS, Taliban berhasil merebut sebagian besar distrik dan ibu kota provinsi, termasuk Kabul, pada Agustus 2021 (Roggio, 2021). Taliban akhirnya mengambil alih kekuasaan di Afghanistan tanpa perlawanan berarti setelah Presiden Ashraf Ghani melarikan diri (Aljazeera, 2021).

Dinamika Hubungan Tiongkok-Afghanistan dibawah Rezim Taliban Tahun 2021

Kembalinya Taliban memimpin Afghanistan, banyak kekhawatiran mengenai stabilitas politik, keamanan, dan hak asasi manusia di negara tersebut. Meskipun Taliban awalnya berjanji untuk membentuk pemerintahan inklusif dan melindungi hak-hak perempuan serta kelompok minoritas (Graham-Harrison 2021), realitasnya menunjukkan sebaliknya. Kebijakan syariah yang diterapkan kemudian justru mengurangi hak-hak perempuan dan menarik perhatian komunitas internasional karena dianggap melanggar HAM.

Situasi keamanan juga memburuk dengan munculnya kembali kelompok-kelompok teroris seperti ISKP yang melakukan serangan brutal, meningkatkan ketidakstabilan di Afghanistan (Bureau of Counterterrorism, 2021). Rekam jejak Taliban yang berhubungan dengan kelompok ekstremis, lumpuhnya *Afghan National Army* dan laporan PBB menyatakan setidaknya ada 8.000-10.000 teroris asing di Afghanistan (Schmitt, 2021), menambah keraguan komunitas internasional terhadap komitmen mereka untuk stabilitas.

Sementara negara-negara lain menjauh, Tiongkok justru mendekatkan diri pada Taliban, melihat peluang dalam kestabilan politik Afghanistan untuk kepentingan ekonomi dan keamanan regional. Tiongkok telah lama berinteraksi dengan Taliban, terutama dengan harapan menjaga stabilitas regional dan memastikan keamanan perbatasannya. Pendekatan diplomasi pragmatis ini diharapkan membuka jalan bagi keterlibatan Tiongkok dalam rekonstruksi Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban.

Analisis Kepentingan Tiongkok Untuk Tetap Mempertahankan Hubungan Diplomatik Dengan Afghanistan Dibawah Rezim Taliban

Bab ini menganalisis kepentingan Tiongkok dalam mempertahankan hubungan diplomatik dengan Taliban di Afghanistan. Menggunakan pemikiran Realisme Defensif, Tiongkok memanfaatkan peluang yang muncul setelah berkurangnya pengaruh AS di wilayah tersebut. Sebagai *rising power*, Tiongkok berfokus pada stabilitas Afghanistan untuk melindungi kepentingan nasionalnya, khususnya dalam mengatasi ancaman separatisme, ekstremisme, dan terorisme (*Three Evils*). Stabilitas ini penting bagi keamanan proyek OBOR di Afghanistan, yang berdampak pada kedudukan Tiongkok dalam sistem internasional.

Persepsi Tiongkok terhadap Ancaman Three Evils di Afghanistan

Paradigma Realisme Defensif membantu memahami kebijakan Tiongkok di Afghanistan, yang berfokus pada keamanan dan stabilitas dalam ambisi "*China Dream*". Inisiatif OBOR menjadi pilar utama manifestasi visi Tiongkok tentang status kekuatan besar. Kestabilan menjadi komponen krusial dalam strategi kebangkitan Tiongkok, khususnya di Afghanistan (Imran, 2019).

Dua tujuan utama telah memandu kebijakan Tiongkok di Afghanistan. Pertama, pendekatan non-intervensi menghindarkan Tiongkok dari keterlibatan militer NATO/ISAF. Kedua, kekhawatiran intervensi militer memicu reaksi negatif dari ETIM dan Taliban di wilayah Xinjiang. Tiongkok khawatir kerusuhan militan Ughyur bisa dieksploitasi oleh kekuatan eksternal seperti AS untuk merongrong integritas teritorial Tiongkok (Imran, 2019).

Keamanan Xinjiang mendefinisikan konsep keamanan Tiongkok di Afghanistan, dengan fokus pada penanggulangan *three evil* (*separatism, terrorism, extremism*) di Afghanistan. Prioritas ini membuat Tiongkok berhati-hati dalam keterlibatannya di Afghanistan sehingga memilih untuk tidak terlibat dalam kampanye GWOT AS di Afghanistan. Pendekatan ini

mencerminkan reputasi Tiongkok yang ingin untuk tidak dianggap subordinat terhadap kepentingan barat dan lebih ditujukan untuk kepentingan ekonomi besarnya melalui proyek OBOR dan CPEC.

Penarikan Pasukan AS dari Afghanistan memberikan perubahan signifikan terhadap dinamika regional Asia Tengah. Kemunduran AS di regional tersebut dimanfaatkan Taliban untuk merebut kembali kekuasaan yang memunculkan berbagai permasalahan. Salah satunya ada kondisi ekonomi Afghanistan yang kian memburuk. Pembekuan aset bank sentral Afghanistan senilai 9.5 miliar USD dan isolasi dari komunitas internasional menyebabkan krisis ekonomi dan kemanusiaan. Tingkat kelaparan yang tinggi serta permasalahan pengungsi memperparah kondisi di Afghanistan.

Dalam perspektif Realisme Defensif, negara akan selalu bergerak untuk menjaga eksistensinya, memungkinkan Taliban untuk mengambil langkah ekstrem seperti menggunakan perdagangan narkoba (opium dan heroin) untuk menompang perekonomian mereka. Meskipun Taliban pernah melarang kultivasi narkoba karena bertentangan dengan ajaran Islam, kondisi krisis memaksa mereka melakukan sebaliknya. Kultivasi yang memberikan pendapatan sebesar 1,4-2,5 miliar USD (9% GDP Afghanistan) pada tahun 2020 memberikan insentif besar bagi Taliban untuk mengembangkan kegiatan ini (UNODC, 2021).

Selain ancaman ekonomi dan kemanusiaan, ancaman terorisme juga datang dari kelompok ISIS-K (atau ISKP) yang memperburuk kondisi di Afghanistan. ISIS-K yang mempunyai perbedaan ideologi dengan Taliban, memandang Taliban telah berkhianat terhadap perjuangan jihad mereka serta mengutuk kultivasi narkoba yang dilakukan Taliban; sebagai tindakan anti-Islam. Eksekusi Omar Khorasani, Pemimpin ISKP oleh Taliban setelah Taliban merebut kekuasaan, kebijakan Taliban

yang mengabaikan HAM yang dapat mendorong kaum non-Pasthun (ETIM) untuk bergabung dengan ISKP, meningkatkan tensi ketidakamanan di Afghanistan. Kondisi ini berpotensi mengubah Afghanistan kembali menjadi medan perang sipil, mengancam stabilitas regional.

Meskipun Taliban berkeinginan untuk berubah secara ideologi, ancaman ISKP mempersulit hal tersebut. Barrech (2021) menyebutkan adanya kemungkinan kelompok tersebut diperkuat oleh negara lain khususnya AS sebagai *proxy*, menyebabkan ketidakstabilan yang merugikan Tiongkok. Potensi kerjasama ISKP dengan ETIM juga menambah ancaman bagi Tiongkok khususnya di wilayah Xinjiang (Tanvir, 2021).

Memanfaatkan rekam jejak AS di Afghanistan yang berakhir dengan 'kegagalan' (SIGAR, 2021). Tiongkok dengan rekam jejak non-intervensi dan keterbukaan ekonomi di Afghanistan memberikan reputasi yang 'ramah Muslim dan mitra ekonomi yang baik dengan keterbukaan yang besar' (Ludwig, 2015; Jaim, 2021). Konteks ini memberikan Tiongkok insentif untuk membuka hubungan dengan Taliban. Berbanding terbalik dengan AS yang 'tidak bertanggung jawab' yang menghasilkan serangkaian kekerasan di Afghanistan.

Zhao Huasheng, peneliti terkemuka Tiongkok menyatakan bahwa "Tiongkok tidak menentang adanya kelompok tersebut tetapi menentang aktivitas separatisme, terorisme dan ekstremisme (*three evil*) (2014). Demikian, Tiongkok mengutamakan stabilitas Afghanistan dibandingkan intervensi langsung. Hua Chunying juga menyatakan penarikan pasukan AS berkontribusi pada peningkatan serangan terorisme (Zhang, 2021).

Sejak tahun 2017, aktivitas terorisme dari ETIM ataupun separatist Ughyur di Xinjiang tidak terjadi (GTD, 2020). Meski demikian, Tiongkok tetap waspada dan percaya bahwa serangkaian serangan terorisme di Xinjiang

tahun 1990-2016 adalah dampak dari ketidakstabilan Afghanistan. Konteks ini diperkuat ketika AS menghapus ETIM dari *Terror Exclusion List* (TEL), mengindikasikan AS tidak lagi menangani dengan ETIM; menuntut Tiongkok mengambil tindakan sendiri (Soliev, 2021). Hal ini relevan dengan situasi di Afghanistan, karena stabilitas di negara tersebut dianggap sebagai kunci dalam menjaga keamanan di Xinjiang yang merupakan kawasan penting bagi pembangunan mega-proyek Tiongkok seperti OBOR dan CPEC.

Tiongkok mengklaim bahwa kooperasi dengan Taliban sangat krusial untuk mengurangi risiko keamanan dan mendukung Taliban untuk tidak terkait dengan ETIM ataupun Al-Qaeda. Dengan posisi Taliban yang rapuh, tanpa legitimasi dan isolasi dari komunitas internasional. Tiongkok khawatir akan potensi Taliban terpaksa bergabung dengan kelompok ekstremis untuk mengamankan eksistensinya; menimbulkan ancaman bagi Tiongkok (Maan, 2021)

Tiongkok juga menegaskan pentingnya prinsip "*Afghan-led, Afghan-owned,*" yang menempatkan masa depan Afghanistan di tangan rakyatnya sendiri. Pendekatan ini berbanding terbalik dengan tindakan AS yang dipandang "tanpa diduga dan tidak bertanggung jawab," yang memicu ketidakstabilan di Afghanistan. Pada tingkat militer, latihan bersama "*Pabbi-Antiterror-2021*" dengan anggota RATS-SCO, termasuk Afghanistan, memperlihatkan keseriusan Tiongkok dalam meningkatkan kapabilitas kontra-terorisme.

Secara ekonomi, Tiongkok melihat peluang dalam menghubungkan Afghanistan dengan OBOR, yang dianggap saling menguntungkan. Namun, stabilitas Afghanistan sangat penting bagi keberhasilan proyek ini. Pada pertemuan di Qatar pada 2021, Wang Yi mendesak Taliban untuk menjaga Afghanistan bebas dari aktivitas terorisme, dan Taliban merespons dengan janji

untuk tidak mengizinkan wilayah mereka digunakan untuk mengancam Tiongkok (FMPRC, 2021). Pernyataan serupa datang dari para pejabat Taliban lainnya, yang menegaskan dukungan mereka terhadap proyek OBOR dan komitmen untuk tidak membiarkan Afghanistan menjadi basis bagi kelompok terorisme (Claire, 2021)

Dalam pandangan kaum Realisme Defensif, negara harus bekerjasama untuk mempertahankan eksistensinya di tengah sistem internasional yang anarkis. Oleh karena itu, Tiongkok mempromosikan kerjasama dengan Afghanistan sambil memastikan bahwa Taliban memenuhi komitmennya untuk memerangi terorisme. Kepentingan geo-ekonomi Tiongkok di Afghanistan juga mencakup pengintegrasian negara tersebut ke dalam OBOR, yang akan memberikan keuntungan strategis bagi Tiongkok (Jain, 2021).

Namun, ancaman dari ISKP tetap menjadi tantangan utama. Meskipun Taliban telah berkomitmen untuk menangani ancaman ini, Tiongkok tetap harus berhati-hati dalam melanjutkan proyek geo-ekonominya, terutama karena adanya kemungkinan persaingan dengan kekuatan lain seperti AS dan India di Afghanistan.

Analisa Pemenuhan Keamanan Geo-Ekonomi Tiongkok di Afghanistan

Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, visi strategis "*China Dream*" mendorong Tiongkok untuk menjadi kekuatan global utama dengan premis '*peaceful development*' dan mendorong kerjasama internasional untuk masa depan bersama (Zhu, 2020). Tiongkok menargetkan dua tahap rencana pembangunan: membangun fondasi ekonomi Tiongkok antara 2020-2035, dan kemudian mencapai pengaruh global substansial antara 2035-2050 (Zhu, 2020). Strategi ini termasuk perluasan penerimaan inisiatif OBOR dan AIIB yang berfungsi sebagai instrumen penting dalam memperluas

pengaruh Tiongkok melalui pengembangan hubungan politik dan ekonomi di seluruh dunia, termasuk di Afghanistan.

Melalui mandat UNAMA tahun 2016 yang diperbarui hingga 2022, Tiongkok telah memasukkan Afghanistan dalam rencana OBOR (UNAMA, 2021). OBOR yang diumumkan Xi Jinping menggunakan posisi strategis Xinjiang sebagai *eurasian crossroad* menciptakan jaringan infrastruktur yang menghubungkan Asia dan Eropa.

Tiongkok juga memanfaatkan forum RECCA ke-VII pada tahun 2017 untuk memperkuat integrasi Afghanistan ke dalam OBOR. Tiongkok berupaya membentuk interkoneksi pada proyek OBOR-RECCA. Mengingat kondisi geografis Afghanistan yang strategis sebagai *transit-hub* memberikan insentif besar bagi kedua negara.

Selain itu, kekayaan Afghanistan dalam deposit mineral langka seperti litium, berilium, dan tantalum—yang penting dalam pembuatan produk teknologi tinggi—serta cadangan tembaga terbesar di Asia Tengah di Mes Aynak, menarik perhatian Tiongkok. Pada 2008, CMGC memenangkan tender untuk mengembangkan dan mengekstraksi tembaga dari tambang Mes Aynak (Asahi, 2021). Selain itu, CNPC juga mengamankan investasi di sektor minyak dan gas alam di Amu Darya..

Investasi Infrastruktur Tiongkok di Afghanistan

1. Tambang Mes Aynak Afghanistan

Cadangan mineral di Mes Aynak diperkirakan mencapai 240 juta ton dengan kadar tembaga 2,3%, yang bernilai setidaknya US\$ 50 miliar (Roy, 2021). Selain tembaga, kekayaan mineral lainnya yang diperkirakan mencapai US\$ 1 triliun menyebabkan Afghanistan dijuluki "*Saudi Arabia of Lithium*" (Risen, 2010). Pada tahun 2008, Tiongkok menguasai 25% saham di Mes Aynak melalui CMGC, dengan kontrak senilai US\$ 3 miliar untuk 30 tahun, menjadikan proyek ini salah

satu yang terbesar di dunia dalam hal kualitas deposit tembaga yang belum dieksploitasi.

Bagi Tiongkok, investasi di Mes Aynak sangat penting untuk mendukung pertumbuhan teknologi. Litium dan logam lain sangat dibutuhkan dalam produksi baterai isi ulang untuk mobil listrik, *smartphone*, dan perangkat teknologi lainnya. Mengingat Tiongkok adalah eksportir elektronik terbesar di dunia, dengan 33,8% dari total ekspor global pada tahun 2018 (OEC, 2018), akses ke sumber daya ini merupakan keuntungan strategis. Namun, manfaat ekonomi ini hanya dapat terwujud jika Taliban dapat menjamin keamanan dan stabilitas di Afghanistan, yang masih menjadi tantangan besar di tengah ancaman terorisme dan konflik internal.

2. Cadangan Minyak Amu Darya Afghanistan

Pada Agustus 2011, Tiongkok berhasil memperoleh hak pengembangan ladang minyak Amu Darya di Afghanistan melalui China National Petroleum Corporation (Gartenstein et al, 2014). Amu Darya diperkirakan memiliki cadangan minyak mencapai 87 juta barel. Bagi Tiongkok, Amu Darya menjadi pijakan awal dalam investasi mereka di sektor gas alam dan minyak bumi. Hal ini tentunya memberikan Tiongkok akses terhadap sumber energi yang penting untuk mendukung ekonomi dan produksi negara tersebut (Gartenstein et al, 2014). Namun, mirip dengan proyek investasi di Mes Aynak, situasi keamanan yang tidak stabil membuat hasil dari investasi ini belum tampak signifikan (Gartenstein et al, 2014).

3. Koridor Kereta Api Lima Negara (FNRC)

Menggunakan forum RECCA ke-VII, FNRC memberikan rute dimulai dari Tiongkok sampai ke Iran yang melewati Kyrgyzstan, Tajikistan dan Afganistan sepanjang 2100 km. FNRC menguntungkan Tiongkok pada efisiensi waktu dan biaya transit (Mantraya, 2018) dan menghubungkan Tiongkok dengan Eropa via

Iran dan Turki (RECCA, 2017). Secara geografis, Tiongkok dan Afghanistan memperoleh keuntungan dalam segi ekonomi dan politik serta menjadi bagian dari interkoneksi antara OBOR dan Afghanistan.

4. **Koidor Lapis-Lazuli**

Rute Koridor Lapis-Lazuli yang dimulai dari Aqina, Afghanistan dan berakhir di Istanbul Turki. Lebih lanjut, Koridor Lapis Lazuli direncanakan terintegrasi dengan proyek "*East-West Trans-Caspian Trade and Transport Corridor*" Turki serta dengan Koridor Kereta Api Lima Negara. (RECCA, 2017).

Bagi Tiongkok, Koridor Lapis-Lazuli melengkapi rute-rute OBOR yang akan membentuk wilayah strategis '*Middle Corridor*'. Wilayah ini tentunya menguntungkan Tiongkok dan berpotensi mempersingkat durasi ekspor antara Beijing-London menjadi 12 hari, meningkatkan efisiensi barang dari Tiongkok ke pasar-pasar Eropa (Ankasam, 2021)

5. **Koridor Transit dan Transportasi Internasional Chabahar dan ANRP**

Koridor Transit dan Transportasi Internasional Chabahar (Perjanjian Chabahar) menghubungkan Afghanistan, Iran, dan India, bertujuan menciptakan jalur transportasi alternatif yang memberikan akses ke pasar internasional melalui angkutan darat, laut, dan udara. Koridor ini juga berupaya menyederhanakan dan menstandarisasi prosedur transportasi serta transit barang dan penumpang di antara ketiga negara. Dalam kaitannya dengan OBOR, Tiongkok memandang pentingnya rute alternatif menuju negara-negara sekitarnya, termasuk akses ke pelabuhan di Iran. Fauzi (2020) menekankan bahwa akses ke sumber daya di negara-negara Teluk memiliki dampak geo-ekonomi yang signifikan.

Proyek Jaringan Kereta Api Afghanistan (ANRP) direncanakan membangun jaringan kereta api trans-Asia di seluruh negeri untuk

menjadikan Afghanistan sebagai pusat transportasi regional. Ini mencakup jaringan regional seperti Iran melalui Zaranj (menuju Pelabuhan Chabahar), Turkmenistan dan Turki melalui Herat-Torghundi (Koridor Lapis-Lazuli), serta Tajikistan, Kirgistan, dan Tiongkok melalui Kunduz-Sherkhan Bandar. Dalam konteks ini, Tiongkok melihat peluang untuk menghubungkan OBOR dengan proyek infrastruktur domestik di Afghanistan, termasuk konektivitas kereta api dan pemberdayaan sumber daya.

Keberadaan geografis Afghanistan menarik minat Tiongkok untuk menjadikannya sebagai pusat perdagangan dan transit yang dapat mempercepat dan memperluas akses ke pasar di Asia dan Timur Tengah (Tellis, 2010). Kekuasaan Taliban di Afghanistan mendorong Tiongkok untuk melihat pentingnya kerjasama guna memastikan kelancaran proyek dan investasi tersebut.

Dalam perspektif kebijakan luar negeri Tiongkok, Yuan Peng (2013) menjelaskan bahwa Asia Tengah, termasuk Afghanistan, merupakan "cincin tengah" yang menghubungkan "cincin dalam" (negara-negara tetangga Tiongkok) dan "cincin luar" (negara-negara di luar Asia). Asia Tengah dilihat sebagai wilayah vital untuk memperluas pengaruh Tiongkok ke tingkat global. Li Yonghui (2013) juga menganggap kawasan ini sebagai "*strategic periphery belt*" yang berperan sebagai penyangga, platform pertumbuhan, dan jalur ekspansi. Perspektif ini selaras dengan konsep geo-ekonomi yang melihat geografi sebagai ruang spesifik yang digunakan untuk kegiatan ekonomi sebagai alat pengaruh (Scholvin & Wigel, 2018).

Demi tercapainya interkoneksi, Tiongkok berulang kali meminta Taliban untuk mengontrol kelompok teroris yang dapat mengancam investasinya. Taliban, yang menganggap Tiongkok sebagai mitra dan sumber dukungan utama, telah menyatakan

komitmennya untuk memastikan keamanan proyek-proyek Tiongkok di Afghanistan (The Economic Times, 2021).

Taliban tertarik dengan kerjasama ekonomi dengan Tiongkok khususnya pada investasi OBOR Tiongkok sebesar US\$ 1 triliun (Jain, 2021). Konteks tersebut memberikan Tiongkok *leverage* dalam menjalankan kepentingan geo-ekonomi.

Pendekatan non agresif Tiongkok pada bidang ekonomi selaras dengan prinsip Realisme Defensif, yang memaksimalkan keamanannya tanpa mengganggu keseimbangan kekuatan yang ada. Demikian, Tiongkok melakukan kebijakan tersebut untuk mempertahankan posisinya sebagai *'rising power'* secara moderat dan tetap sebagai negara *status-quo* dalam upayanya merealisasikan *"China Dream"*.

PENUTUP

Keamanan menjadi prioritas utama bagi Tiongkok dalam memastikan kedudukannya di sistem internasional yang anarkis. Untuk itu, Tiongkok membangun kerjasama ekonomi dengan Afghanistan dan memanfaatkan perlindungan dari ISAF/NATO selama 2001-2020. Namun, penarikan pasukan AS pada Agustus 2021 memberikan kesempatan bagi Taliban untuk merebut kembali kekuasaan, yang kemudian memicu sanksi internasional. Taliban, yang berusaha bertahan dalam sistem anarkis dengan cara ekstrem seperti menjadi negara narkoba dan menjalin hubungan dengan kelompok teroris, menciptakan dilema keamanan bagi Tiongkok, terutama karena perbatasan langsung kedua negara.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Tiongkok merespon perubahan ini dengan memodifikasi kebijakan luar negerinya. Pada tingkat sistem, penarikan pasukan AS membuka peluang bagi Tiongkok untuk memainkan peran lebih dominan di Asia Tengah. Sanksi dan

isolasi terhadap Taliban memberi Tiongkok kesempatan untuk memanfaatkan situasi dan mengatasi dilema keamanan yang ditimbulkan oleh ekstremisme Taliban. Kondisi geografis Afghanistan yang strategis, sebagai penghubung antara wilayah dalam dan luar Tiongkok, membuat kawasan ini vital bagi kepentingan geo-ekonomi dan konektivitas regional melalui strategi OBOR.

Kerjasama strategis dengan Taliban memungkinkan Tiongkok untuk menstabilkan kawasan dan melindungi kepentingan nasionalnya, khususnya dalam menjaga keamanan Xinjiang dari ancaman kelompok ETIM. Pendekatan ini juga mencerminkan upaya Tiongkok untuk memperluas pengaruh di Asia Tengah, yang penting untuk keberhasilan proyek OBOR. Dengan menciptakan ketergantungan ekonomi, Tiongkok berusaha memastikan Afghanistan tetap stabil di bawah Taliban, sehingga kepentingannya sebagai *rising power* dapat terjaga melalui kestabilan regional dan keamanan yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Ankasam. (2021). *Lapis Lazuli Corridor: A gate on the Beijing-London line*. Tersedia di <https://www.ankasam.org/lapis-lazuli-corridor-a-gate-on-the-beijing-london-line/?lang=en> Diakses 14 Mei 2023
- Huasheng, Z. (2012). *China and Afghanistan: China's interests, stances, and perspectives*. Center for Strategic & International Studies.
- Huasheng, Z. (2014). *Chinese views of post-2014 Afghanistan*. Asia Policy, 17, 54–58.
- Ludwig, J. (2015). *Sino-Afghan relations in the twenty-first century: From uncertainty to engagement?*. Griffith Asia Quarterly, 3(1), 38–61.
- Suwari, N. W., Sushanti, S., & Parameswari, A. A. (2021). *Rasionalitas Amerika Serikat dalam Perjanjian Damai dengan Taliban Pasca Konflik Di Afganistan*.

- Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional, 1(1), 1-15.
- Waltz, K. N. (1979). *The anarchic structure of world politics*. International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues, 29-49.
- Zakaria, F. (1999). *From wealth to power: The unusual origins of America's world role* (Vol. 84). Princeton University Press.
- Telbami, S. (2002). *Kenneth Waltz, neorealism, and foreign policy*. Security Studies, 11(3), 158-170.
- Jervis, R. (1978). Cooperation under the security dilemma. *World politics*, 30(2), 167-214.
- Blackwill, R. D., & Harris, J. M. (2016). *War by other means: Geoeconomics and statecraft*. Harvard University Press.
- Hsiung, J. C. (2009). *The age of geoeconomics, China's global role, and prospectsof cross-strait integration*. Journal of Chinese Political Science, 14, 113-133.
- Bhatti, H. J., & Alymenko, A. (2017). *Geoeconomics and the impact of the rise of China*. Diva publications
- Wigell, S. S. M., & Scholvin, M. (2018). *Geo-economics as concept and practice in international relations*. FIIA Working Paper 102.
- Creswell, J. W. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Pillsbury, M. (2015). *The hundred-year marathon: China's secret strategy to replace America as the global superpower*. Henry Holt and Company.
- History. (2010). *September 11 attacks*. Tersedia di: <https://www.history.com/topics/21st-century/9-11-attacks>. Diakses 30 Januari 2024
- Wildman, D., & Bennis, P. (2010). *The war in Afghanistan goes global*. Critical Asian Studies, 42(3), 469-480.
- Pantucci, R., & Schwarck, E. (2014). *Transition in Afghanistan: Filling the Security Vacuum: The Expansion of Uighur Extremism*. CIDOB Policy Research Project, 11
- Wines, Michael & Declan Walsh. (2012). *China Says Wanted Militants Use Nearby Countries to Stage Attacks*. Tersedia di: <https://www.nytimes.com/2012/04/07/world/asia/china-says-wanted-militants-use-nearby-countries-to-stage-attacks.html>. Diakses 1 Agustus 2024
- Zaeef, Abdul Salam. (2011). *My Life with the Taliban*. Hurst & Company.
- Imran, S. (2019). *Sino-US Involvement in Afghanistan*. Strategic Studies, 39(3), 53-72.
- Zhang, B. (2010). *Chinese Foreign Policy in Transition: Trends and Implications*. Journal of Current Chinese Affairs, 2(39), 39-6.
- Jyalita, V. V. H. (2021). *Defensive realism's perspective on rising China's behavior as a status quo state*. Jurnal Sentris, 2(1), 73-86.
- United Nations Press. (2019). *Security Council extends mandate of United Nations Assistance Mission in Afghanistan*. UNPress
- Aljazeera. (2021). *Taliban enter Kabul from all sides*. Tersedia di: <https://web.archive.org/web/20210815081408/https://www.aljazeera.com/news/2021/8/15/taliban-enter-kabul-from-all-sides>. Diakses 29 April 2023
- Graham-Harrison, E. (2021). *Switched off: Afghan media struggle to survive under Taliban rule*. Tersedia di: <https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2021/nov/27/radio-silence-afghan-stations-are-one-more-casualty-of-the-taliban>. Diakses 19 Oktober 2023
- Schmitt, E. (2021). *ISIS branch poses biggest immediate terrorist threat to evacuation in Kabul*. Tersedia di: <https://www.nytimes.com/2021/08/25/us/politics/is-is-terrorism-afghanistan-taliban.html>. Diakses 22 Januari 2023
- UNODC. (2021). *Afghanistan Opium Survey 2021 – Cultivation and Production*. UNODC
- Barrech, D. M., Anjum, N., & Chohan, Z. A. (2021). *The Taliban takeover in Afghanistan: Where does China stand?*. Journal of Pakistan-China Studies (JPCS), 2(1), 64-94
- Tanvir, M. H. (2021). *Taliban leadership vs ISKP in Afghanistan: A cause of concern*. Tersedia di: <https://www.paradigmshift.com.pk/taliban-leadership-vs-iskp-in-afghanistan/>. Diakses 18 Desember 2023
- Zhang, Rachel. (2021). *China looks to Central Asia on security to create 'safe Silk Road'*. Tersedia di: <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3133520/china-looks-central-asia-security-create-safe-silkroad?module=inline&pgtype=article>. Diakses 15 Februari 2024
- Global Terrorism Database. (2020). *Terrorism in China 1990-2021*. Tersedia di: https://www.start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?chart=overtime&casualties_type=b&casualties_max=&start_yearonly=1990&end_yearonly=2020&

- [dtp2=all&country=44&count=100](#). Diakses 1 Agustus 2022.
- Soliev, N. (2021). *China. Counter Terrorist Trends and Analyses*. 13(1), 95–100.
- Maan, A. (2021). *China's prospects in Afghanistan: Opportunities and adversities*.
- Mills, Claire. (2021). *Afghanistan: Fall of the Government and the transition of power*. The Commons Library Parliament UK
- Jain, BM. (2021). *China's geostrategic engagement in a new Afghanistan*. Tersedia di: <https://eastasiaforum.org/2021/10/08/chinas-geostrategic-engagement-in-a-new-afghanistan/>. Diakses 2 Agustus 2024
- Zhu, X. (2020). *China's Peaceful Rise: A Necessary Path with Challenges*. In 6th International Conference on Humanities and Social Science Research (ICHSSR 2020) (pp. 81-84). Atlantis Press.
- UNAMA. (2021). *UN Security Council renews UNAMA's mandate*. UNAMA
- Asahi. (2021). *China's Jiangxi Copper to develop Afghanistan copper mine when situation allows*. Tersedia di: <https://www.asahi.com/ajw/articles/14439265>. Diakses 7 Juni 2023
- Roy, Chaudhury. (2021). *China moves fast to engage Taliban Govt eyeing Aynak copper mines*. Tersedia di: <https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/china-moves-fast-to-engage-taliban-govt-eyeing-aynak-copper-mines/articleshow/86240838.cms>. Diakses 4 Januari 2024
- Risen, James. (2010). *U.S. Identifies Vast Mineral Riches in Afghanistan*. Tersedia di: <https://www.nytimes.com/2010/06/14/world/asia/14minerals.html?pagewanted=all>. Diakses 2 Januari 2023
- OECD. (2018). *Electronics Data Trade*. Tersedia di: <https://oec.world/en/profile/sitc/electronics>. Diakses 12 Agustus 2022
- Gartenstein-Ross, D., Trombly, D., & Barr, N. (2014). *China's post-2014 role in Afghanistan*. Foundation for Defense of Democracies Washington, DC.
- Mantraya. (2018). *Analysis: Five Nations Railway Corridor Project: Increasing connectivity and Chinese dominance in Afghanistan*. Tersedia di: <https://mantraya.org/analysis-five-nations-railway-corridor-project-increasing-connectivity-and-chinese-dominance-in-afghanistan/>. Diakses 13 Februari 2024
- RECCA. (2017). *RECCA Annual Review*. Islamic Republic of Afghanistan: RECCA.
- Fauzi, A. (2020). *Kepentingan Tiongkok Dibalik Upaya Perdamaian Antara Pemerintah Afghanistan Dengan Taliban Periode*. Fisip UIN Jakarta.
- Tellis, A. J., & Mukharji, A. (2010). *Is a regional strategy viable in Afghanistan*. Carnegie Endowment for International Peace.
- Peng, Y. (2013). *Thoughts on China's Great Periphery Strategy in the New Period*. *Xiandai Guoji Guanxi*, 5, 30-31.
- Yonghui, Li. (2013). *Constructing a strategic peripheral belt to support the wings of China's rise*. *Contemporary International Relations*, 23(6), 66–70.
- The Economic Times. (2021). *Afghan Taliban says it sees China as a 'friend', promises not to host Uyghur militants from Xinjiang: Report*. Tersedia di: <https://economictimes.indiatimes.com/news/defense/afghan-taliban-says-it-sees-china-as-a-friend-promises-not-to-host-uyghur-militants-from-xinjiang-report/articleshow/84295588.cms>. Diakses 2 Agustus 2024